

## LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)**

---

Rapat Ke	: 01
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / ke-1
Dengan	: 1. Menteri Keuangan RI 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 28 Juni 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Virtual/ <i>Video Conference</i>
Ketua Rapat	: <b>H. DITO GANINDUTO, MBA</b> (Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara	: Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hadir	: 1. ... orang dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI; 2. <b>SRI MULYANI INDRAWATI</b> (Menteri Keuangan) beserta jajarannya; 3. <b>YASONNA H. LAOLY</b> (Menteri Hukum dan HAM) beserta jajarannya.

### **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6)

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.15 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM) menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi XI DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil dari Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan sepakat akan melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai substansi Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Rapat-rapat Panitia Kerja yang diketuai oleh Saudara Drs. Fathan.
3. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Fraksi-fraksi diserahkan ke Sekretariat Komisi XI DPR RI paling lambat tanggal 23 Agustus 2021.

## **III. PENUTUP**

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka mendengarkan Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditutup pada pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2021

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

ttd

**H. DITO GANINDUTO, MBA**